

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi kemiskinan yaitu ketidak sanggupannya individu memenuhi kebutuhan dasar mereka, sedangkan kondisi lingkungan sekitar juga kurang mendukung mereka untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan maupun keluar dari situasi tersebut. Masalah ini menjadi tantangan bagi semua negara, apalagi negara yang sedang berkembang atau masih tertinggal. Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan saling berkaitan dengan berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya.¹

Sumatera Barat mempunyai budaya dan sumber daya alam yang sangat beragam, dengan perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan pariwisata. Namun, provinsi ini tetap menghadapi tantangan kemiskinan akibat faktor struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, pertumbuhan penduduk, dan ketergantungan pada sektor tradisional. Dalam mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan upaya melindungi SDA (sumber daya alam).²

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa kemiskinan di Sumatera Barat selama periode tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi. Tingkat kemiskinan

¹ Sa'Diyah El Adawiyah, "Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya", *Khidmat Sosial, Journal Of Social Work And Social Service*, Vol 1, No 1, (2020), Hal. 44-45

² Jaka Maulana Afri1, Syamsul Amar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Sumatera Barat", *Media Riset Ekonomi Pembangunan (Medrep)*, Vol 2, No 1, (2025), Hal. 2

tahun 2021 (6,63%), menurun pada tahun 2022 (5,92%). Penurunan ini ditandai pada sejumlah kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan infrastruktur dan sektor pertanian, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.³ Angka ini mencerminkan adanya upaya dalam penanggulangan kemiskinan, meskipun masih menghadapi tantangan di beberapa daerah.

Kemiskinan meningkat kembali tahun 2023 (5,95%), dan 2024 (5,97%), kenaikan angka ini disebabkan oleh kebijakan, program, dan anggaran pemerintah yang belum sepenuhnya mampu memenuhi hak dasar masyarakat, serta perbedaan data kemiskinan antara pemerintah daerah dan pusat yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, kurangnya pemerataan distribusi ekonomi dan kesenjangan pendapatan turut memperburuk kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**
Tabel 1.1 Kemiskinan di Sumatera Barat

Kabupaten / Kota di Sumatera Barat	Tingkat Kemiskinan (dalam %)			
	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Mentawai	14,84	13,97	13,72	13,89
Pesisir Selatan,	7,92	7,11	7,34	7,49
Kab. Solok	8,01	7,12	7,13	7,31

³ Resfaliza, "Kausalitas Antara Variabel Makro Dan Stunting Di Sumatera Barat Periode 2021 -2023", *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Vol 6, No 3, (2024), Hal. 661

Sijunjung	6,80	6,00	5,88	5,78
Tanah Datar	4,54	4,26	4,16	4,28
Padang Pariaman	7,22	6,25	6,34	6,27
Agam	6,85	6,22	6,60	6,83
Lima Puluh Kota	7,29	6,59	6,80	6,92
Pasaman	7,48	6,85	6,80	6,74
Solok Selatan	7,52	6,51	6,45	6,56
Dharmasraya	6,67	5,56	5,56	5,32
Pasaman Barat	7,51	6,93	6,92	7,00
Padang	4,94	4,26	4,17	4,06
Kota Solok	3,12	3,02	3,05	3,07
Sawahlunto	2,38	2,28	2,27	2,33
Padang Panjang	5,92	5,14	5,24	5,31
Bukittinggi	5,14	4,46	4,11	4,08
Payakumbuh	6,16	5,66	5,44	5,19
Pariaman	4,38	4,13	4,20	4,26
Sumatera Barat (total)	6,63	5,92	5,95	5,97

Sumber : BPS Sumatera Barat tahun 2025

Data tersebut menunjukan bahwa Kepulauan Mentawai termasuk daerah dengan persentase kemiskinan paling tinggi di Sumatera Barat selama periode 2021–2024. Meskipun data tersebut menunjukkan adanya penurunan, Kepulauan Mentawai tetap sebagai Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Kadaan tersebut terjadi karena faktor

geografis, akses terbatas terhadap infrastruktur, serta ketergantungan pada sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap perubahan cuaca dan bencana alam.

Sementara Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan paling rendah adalah Sawahlunto. Keadaan ini menunjukkan keberhasilan daerah tersebut terhadap pengelolaan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Sawahlunto yang dulunya mengandalkan sektor tambang batu bara, namun saat ini mulai bertransformasi menjadi kota dengan sektor ekonomi yang lebih beragam hingga daerah ini mampu menurunkan angka kemiskinan.

Selain kemiskinan, jumlah penduduk Sumatera Barat mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Populasi penduduk tahun 2021 (5,58 juta) tahun 2022 (5,64 juta), tahun 2023 (5,70 juta), dan tahun 2024 (5,83 juta). Meskipun pertumbuhan penduduk menjadi indikasi kemajuan demografis, hal ini juga menimbulkan efek negatif, seperti meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan memperburuk masalah kemiskinan. Perlu dilakukan berbagai kebijakan menanggulangi hal tersebut.⁴

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Sumatera Barat (jiwa)

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Mentawai	88.389	89.401	91.43	92.76
Pesisir Selatan	509.618	516.518	525.36	532.91

⁴ Subair, “Relevansi Teorimal Thusdalam Diskursus Kependudukan Kontemporer”, *Jurnal Dialektika*, Vol. 9, No. 2, (2025), Hal.102

Kab. Solok	394.237	397.829	405.38	410.43
Sijunjung	237.313	240.317	243.71	246.78
Tanah Datar	373.693	376.276	383.68	388.23
Padang Pariaman	433.018	436.129	451.39	459.17
Agam	534.202	540.905	551.89	559.30
Lima Puluh Kota	385.634	388.375	396.43	401.09
Pasaman	303.103	307.425	313.20	318.08
Solok Selatan	184.854	188.649	191.54	195.03
Dharmasraya	231.217	234.713	239.92	244.03
Pasaman Barat	436.313	442.479	450.05	456.47
Padang	913.448	919.145	924.94	954.18
Kota Solok	74.469	75.850	77.84	79.46
Sawahlunto	65.687	66.413	67.76	68.73
Padang Panjang	56.971	57.850	58.63	59.45
Bukittinggi	121.588	122.311	124.05	125.02
Payakumbuh	141.184	143.325	144.83	146.73
Pariaman	95.294	96.719	97.21	98.43
Sumatera Barat (total)	5.580.232	5.640.629	5.700.573	5.836,16

Sumber : BPS Sumatera Barat tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan populasi terbanyak di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang. Sementara jumlah penduduk paling rendah adalah Kepulauan Mentawai. Berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinannya yang tinggi, jumlah penduduk di Kepulauan

Menetawai sangat rendah. Kemiskinan di Sumatera Barat menunjukkan pola yang tidak merata antarkabupaten/kota.

Jumlah penduduk menjadi faktor penting peningkatan kemiskinan. Hal ini terlihat dari hasil Pengukuran kemiskinan dengan metode FGT, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk cenderung diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan.⁵ Selain jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga turut berperan menentukan tingkat kemiskinan. PDRB berfungsi sebagai tolak ukur dalam melihat situasi perekonomian pada daerah dan waktu tertentu.⁶

PDRB berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi, semakin meningkat nilai PDRB, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga meningkat. Berbanding terbalik dengan kemiskinan yang fluktuatif, PDRB Sumatera Barat mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2021, sebesar 174.999,89 Milyar rupiah, tahun 2022 meningkat 182.628,34 Milyar rupiah, tahun 2023 mencapai 191.670,55 Milyar rupiah, dan tahun 2024 mencapai 199.407,38 Milyar Rupiah. Kenaikan PDRB ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, yang mampu mendorong daya beli masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Namun, meskipun PDRB meningkat, dampak positif tersebut tidak selalu merata.

PDRB ADHK menghitung nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi

⁵ Reren Anggraini, Syahril, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Padang", *Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi*, Vol 3, No1, (2021), Hal. 160

⁶ Badan Pusat Statistik (Bps) Sumatera Barat <https://Sumbar.Bps.Go.Id/Id> Diakses Pada 11 Feburari 2025 Pada Jam 22.40

dengan menggunakan harga konstan pada tahun tertentu, hingga mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa terdistorsi oleh inflasi. Selain itu, PDRB ADHK juga digunakan untuk memantau dinamika ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu.⁷ PDRB ADHK juga merupakan instrumen analisis untuk menilai dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut merupakan data PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.⁷

Tabel 1.3 PDRB ADHK

PDRB ADHK				
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Mentawai	3040,97	3191,3	3320,15	3451,93
Pesisir Selatan	9788,46	10131,47	10608,29	11015,21
Kab. Solok	1054,97	1008,01	11437,87	
Sijunjung	6892,61	7163,43	7468,60	7758,79
Tanah Datar	9889,46	10300,93	10757,91	11172,45
Padang Pariaman	12195,75	13029,17	13740,82	14369,24
Agam	14942,56	15572,21	16275,98	16946,60
Lima Puluh Kota	11430,81	11890,13	12430,83	12932,00
Pasaman	6327,97	6586,26	6876,87	7148,27
Solok Selatan	4058,51	4221,15	4414,12	4594,77

⁷ Lucky Riana “Putri, Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan Pdrb Kota Surakarta”, *Jurnal Cakra Wisata*, Vol 21, No 1, (2020), Hal. 45

Dharmasraya	7708,75	8037,79	8387,15	8711,16
Pasaman Barat	11675,98	12158,62	12684,89	13202,35
Padang	45226,64	47175,95	49316,19	51611,55
Kota Solok	2936,55	3071,58	3219,31	3365,78
Sawahlunto	2829,35	2941,27	3072,35	3195,86
Padang Panjang	2631,38	2746,84	2879,85	3009,93
Bukittinggi	6263,04	6555,33	6869,40	7180,21
Payakumbuh	4572,19	4778,35	5002,70	5229,45
Pariaman	3668,98	3835,25	4018,87	4.200,08
Sumatera Barat	174.999,89	182.628,34	191.070,55	199.407,3
(total)				8

Sumber : BPS Sumatera Barat tahun 2025

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel di atas, PDRB ADHK tertinggi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yakni di Kota Padang. Sementara Kabupaten/Kota dengan PDRB ADHK paling rendah adalah Padang Panjang. Peningkatan PDRB sering kali berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Ketika PDRB meningkat, pendapatan per kapita juga meningkat, hal ini dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Apabila hasil pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata, kenaikan PDRB belum tentu mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, bahkan dapat memperlebar kesenjangan.⁸

Kemiskinan di suatu daerah dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi

⁸ Enzelina Puspita Sari , “Novianti, Pengaruh Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Barat Tahun 2017-2022”, *Ekodestinas: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Pariwisata*, Vol 2, No 1, (2024), Hal. 37

jumlah penduduk, PDRB dan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat tanpa didukung peningkatan kapasitas ekonomi dapat memperburuk distribusi sumber daya, menekan upah riil, dan memperluas kesenjangan sosial. Pernyataan ini sesuai dengan pandangan Malthus, bahwa pertumbuhan populasi yang melebihi kemampuan produksi ekonomi (seperti pangan dan lapangan kerja) akan memicu kemiskinan akibat kelangkaan sumber daya.⁹

Peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi pertumbuhan lapangan kerja atau produktivitas dapat memperburuk kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk tinggi (misalnya akibat fertilitas atau migrasi), sementara kesempatan kerja terbatas, jumlah penduduk miskin berpotensi meningkat. PDRB yang meningkat umumnya berkorelasi dengan penurunan kemiskinan, jika pertumbuhan tersebut inklusif, terutama di sektor padat karya (pertanian, UMKM, jasa). Namun, jika PDRB tumbuh dari sektor kapital-intensif (seperti pertambangan), dampaknya terhadap kemiskinan mungkin minimal.¹⁰

Maksud penelitian ini yakni mengkaji kontribusi jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu 2021–2024. Secara khusus tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengevaluasi dampak peningkatan penduduk terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan di setiap kabupaten/kota.

⁹ Fitri Amalia, et.al, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung : Oeconomicus Journal Of Economics, 2022), Hal. 207

¹⁰ Hafiz Nabawi, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Kota Malang”, *Oeconomicus Journal Of Economics*, Vol. 4, No.2, (2020), Hal. 106

2. Mengevaluasi kontribusi pertumbuhan PDRB, baik secara agregat maupun sektoral, terhadap perubahan tingkat kemiskinan.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada pemerintah daerah dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selama periode 2021–2024 menunjukkan pola fluktuatif. Sementara itu, jumlah penduduk tercatat mengalami peningkatan, begitu pula dengan PDRB yang juga menunjukkan peningkatan. Dengan demikian, peneliti memilih judul penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2024”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis tentang pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan, dengan fokus pada Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2021 hingga 2024.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini diuraikan dalam beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk dan PDRB secara simultan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2021-2024?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai masalah penelitian yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024.
2. Guna mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024.
3. Guna mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap kemiskinan secara bersama-sama di Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024.

E. Manfaat Penelitian

Temuan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berkontribusi memperluas pengetahuan serta pemahaman terkait penerapan metode penelitian khususnya terkait pengaruh jumlah penduduk serta PDRB dalam menentukan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.
 - b. Menjadi sumber informasi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis

Sebagai bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama melakukan studi di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

b. Pemerintah

Temuan ini diharapkan menjadi acuan untuk merancang strategi kebijakan pengentasan kemiskinan agar lebih optimal, dan memperhitungkan aspek-aspek seperti jumlah penduduk dan PDRB.

F. Sistematika Penelitian

Agar para pembaca dapat mengikuti penelitian ini dengan mudah, maka disusunlah sistematika pembahasan yaitu:

BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Batasan dan Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori berisi Landasan Teori yang Berkaitan dengan Judul Peneliti, Hubungan Antar Variabel Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian berisi Ruang Lingkup dan Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Defenisi Operasional Variabel dan Indikator dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Pembahasan berisi Pembahasan dan Uraian Hasil Penelitian.

BAB V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran